**LEMBAGA ADAT MELAYU RIAU PERIODE 2012-2017 DALAM MENEGAKKAN IDENTITAS KOLEKTIF MASYARAKAT RIAU**

**By :Syu’ib/1001112183**

Syuibidris1@gmail.com

**Tutor : Dr. Hasanuddin, M.Si**

Government Science Of The Faculty of Socical and Political Science

University of Riau

Soebrantas street, Pekanbaru

28293-Telp/Fax. 0761-63277

Abstraks

Customs institutions malays riau or LAM Riau has founded on 06 june 1970 with the spirit of to maintain and preserve customs malays riau. This study attempts to knowledgeable about customs institutions malays riau 2012-2017 period in enforcing collective riau identity community.

This research using 7 the key informants comprising the government riau , council members riau, the DPH LAM Riau and LAM district , the private perusaahaan, the civil organitation of malays in riau and host of an organization students .This research see what customs institutions malays riau 2012-2017 period in enforcing the identity of collective riau and see faktor-faktor an impediment to enforce collective riau identity people .

This research result indicates activity undertaken by lam riau in upholding collective identity masrakat riau.From this research result can be inferred customary malay institution riau saw efforts to enforce collective identity this must be supported by all parties in the form of a conservation done in direct interaction , its cultural experience , and in the form of information center that could difungsionalisasikan into the form of organising events malay culture .

**Keyword : Customary Malay Institution Riau, Society Collective Identity Riau**

# I

# PENDAHULUAN

**1. Latar Belakang**

Dalam menjaga warisan dan pelestarian identitas simbol melayu, Lembaga Adat Melayu Riau (LAM) mengupayakan untuk menjaga, dan melestarikan simbol identitas melayu dan bekerjasama dengan pemerintahan Provins Riau dalam mencapai Visi dan Misi Riau 2025. Diantaranya kerjasama LAM RIAU dengan pemerintah dapat terlihat dalam pelestarian budaya daerah yang terdapat dalam Peraturan Daerah Provinsi Riau No. 1 Tahun 2012 pada Bab IX Pasal 11

LAM Riau di setiap tingkatan berperan:

* 1. Melakukan inventarisasi aktifitas adat istiadat, seni dan nilai sosial budaya Daerah;
  2. Melakukan inventarisasi aset kekayaan budaya dan peninggalan sejarah daerah;
  3. Melakukan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan pengelolaan serta pengembangan aktifitas adat, seni/nilai sosial budaya daerah; dan

Melakukan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan pemeliharaan serta pendayagunaan aset kekayaan budaya dan peninggalan sejarah daerah.

Hubungan kerja sama LAM Riau dengan pemerintah daerah DPRD Provinsi Riau adalah dalam pengambilan kebijakan, LAM Riau sudah memiliki peran dalam proses pengambilan kebijakan, dalam pembuatan rancangan Peraturan daerah (Perda). LAM Riau dilibatkan dalam proses pembuatan rancangan Peraturan daerah, khususnya Peraturan daerah yang berkaitan dengan budaya atau adat masyarakat Riau

Dilatar belakangi secara historis maka Pemerintah Provinsi Riau ingin mempertahankan dan mengembangkan kebudayaan melayu sebagai identitas kolektif masyarakat Riau.Karena keberagaman masyarakat Provinsi Riau semakin terlihat dari persentase etnis yang terdiri dari Melayu, Jawa, Minang, Batak, Banjar, Bugis, tiongha dan suku-suku lainnya. Hal ini dapat dilhat pada tabel berikut ini :

**Daftar Tabel I.1**

**Etnis Yang Ada Provinsi Riau**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Suku** | **Jumlah** | **Persentase (%)** |
| 1 | Melayu | 2.103.659 | 37,74% |
| 2 | Jawa | 1.431.598 | 25,05% |
| 3 | Minang | 672.621 | 11,26% |
| 4 | Batak | 400.837 | 7,31% |
| 5 | Banjar | 191.787 | 3,78% |
| 6 | Bugis | 139.26 | 2,27% |
| 7 | Sunda | 103.012 | 1,6% |
| 8 | Tiongha | 188.897 | 3,72% |
| Jumlah | | 5.726.241 | 100 |

*Sumber data : Dokumentasi LAM Riau*

LAM Riau bekerjasama dengan pemerintah Provinsi, berdasarkan peraturan daerah Provinsi Riau nomor 1 tahun 2012 tentang Lembaga Adat Melayu Riau pada bab V Pasal 6 mengenai Tujuan, disebutkan beberapa tujuan dari Lembaga Adat Melayu Riau ialah.[[1]](#footnote-1) :

1. LAM Riau bertujuan untuk menggali, membina, melestarikan, memelihara dan mengembangkan nilai-nilai adat dan nilai-nilai sosial budaya sebagai landasan memperkuat dan memperkokoh jati diri masyarakat Melayu.
2. LAM Riau bertujuan melindungi dan membela hak-hak tradisional dan konstitusional masyarakat adat,dan nilai sosial budaya untuk kepentingan peningkatan kesejahteraan lahiriah dan batiniah masyarakat Melayu Riau.
3. LAM Riau bertujuan mewujudkan masyarakat adat dan nilai-nilai sosial budaya yang maju, adil dan sejahtera dalam tatanan masyarakat madani.

Seiring dengan berakhirnya Pemerintahan orde baru maka Provinsi Riau dengan segera menetapkan visi dan misi Provinsi Riau yang semula tahun 2020 diperpanjang menjadi tahun 2025, perpanjang visi dan misi Riau 5 tahun kedepannya, disesuaikam dengan undang-undang nomor 17 tahun 2007 , dimana Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) di samakan dengan Rencana Pembangunan Jangkan Panjang Nasional tahun 2025 (RPJPN), yang tertuang dalam Perda nomor 36 Tahun 2001 yang berbunyi : “Terwujudnya Provinsi Riau sebagai Pusat Perekonomian dan Kebudayaan Melayu dalam lingkungan masyarakat yang agamis, sejahtera lahir bathin, di Asia Tenggara Tahun 2020”.

Berdasarkan AD/ART Lembaga Adat Melayu Riau dijelaskan terdapat Dewan Kehormatan Adat (DKA-LAM Riau), Majelis Kerapatan Adat (MKA-LAM Riau), dan juga Dewan Pimpinan Harian (DPH-LAM Riau).

1. **Dewan Kehormatan Adat LAM Riau**

Dewan Kehormatan Adat (DKA) Lembaga Adat Melayu Riau berfungsi sebagai unsur persebatian Lembaga Adat Melayu Riau dengan tetua adat dan tokoh masyarakat Melayu Riau yang dapat memberikan tunjuk ajar, petuah amanah dalam melaksanakan kegiatan Lembaga Adat Melayu Riau. Anggota Dewan Kehormatan Adat (DKA) dipilih dengan prinsip musyawarah mufakat dalam musyawarah besar (MUBES-LAM Riau).

1. **Majelis Kerapatan Adat (MKA-LAM Riau)**

Majelis Kerapatan Adat Lembaga Adat Melayu Riau (MKA-LAM Riau) merupakan suatu majelis yang berfungsi sebagai :

* 1. Suatu unsur pucuk pimpinan Lembaga Adat Melayu Riau yang berperan sebagai pemberi petuah dalam hal ikhwal adat dan hukum adat, serta memberikan pertimbangan, pemikiran dan pemecahan masalah yang dihadapi masyarakat adat Melayu Riau.
  2. Memberikan pertimbangan, persetujuan dan pengendalian terhadap kebijakan atau program yang dilaksanakan Dewan Pimpinan Harian (DPH) Lembaga Adat Melayu Riau.
  3. Pertimbangan, nasehat dan petuah dari Majelis Kerapatan Adat LAM Riau dijadikan acuan utama oleh Dewan Pimpinan Harian

Adapun hubungan kerja antara Majelis Kerapatan Adat (MKA) LAM Riau dengan Dewan Pimpinan Harian (DPH) LAM Riau adalah hal-hal yang berhubungan dengan petuah, amanah, program umum dan kebijakan yang ditetapkan oleh Majelis Kerapatan Adat (MKA) LAM Riau bersama dengan DPH LAM Riau sebagai pelaksana.

Anggota Majelis Kerapatan Adat (MKA) LAM Riau dipilih dengan prinsip musyawarah dan mufakat dalam Musyawarah Besar (MUBES) LAM Riau untuk masa jabatan 5 tahun, anggota MKA LAM Riau terdiri dari :

1. Unsur pemangku dan pemuka adat Melayu Riau, Alim Ulama, Cerdik Cendikia terutama yang berada di Ibukota Provinsi Riau, dengan jumlah yang disesuaikan.

2. Unsur-unsur anggota Majelis Kerapatan Adat (MKA) LAM Riau sedapat mungkin harus mencerminkan unsur perwakilan Kabupaten/Kota, Kawasan Adat dalam daerah Riau.

Jumlah kepengurusan Majelis Kerapatan Adat (MKA) LAM Riau disesuaikan dengan keperluan, susunan Pimpinan Majelis Kerapatan Adat (MKA) LAM Riau terdiri dari :

1. Ketua Umum MKA LAM Riau

2. Para Ketua

3. Sekretaris Umum

4. Para Sekretaris

5. Anggota-anggota MKA

Harapan untuk menjadikan daerah Riau sebagai pusat Budaya Melayu se-Asia Tenggara ini merupakan terget baru yang sedang dibidik oleh Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau dan menjadi komitmen baru dalam rangka pencapaian visi dan misi Riau 2025.

Dengan demikian kelompok kepengurusan LAM Riau diisi oleh tokoh-tokoh berpengaruh di Riau, namun saat ini belum terlihat tanda-tanda bahwa budaya melayu menjadi identitas kolektif bersama masyarakat Riau. Hal tersebut terbukti dengan kurangnya kesadaran dari setiap orang yang melakukan urbanisasi ke provinsi Riau bahwa mereka berada diwilayah yang memiliki budaya dan adat istiadat Melayu. Berdasarkan gejala yang penulis uraikan di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan ini dalam sebuah penelitian dalam bentuk karangan ilmiah yang berjudul “**Lembaga Adat Melayu Riau Periode 2012-2017 Dalam Menegakkan Identitas Kolektif Masyarakat Riau”.**

**Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahannya adalah :

Bagaimanakah Lembaga Adat melayu Riau dalam menegakkan identitas kolektif masyarakat Riau?

Apa saja faktor-faktor yang menghambat upaya menegakkan identitas kolektif masyarakat Riau?

**Tujuan dan Manfaat Penelitian**

1. Tujuan Penelitian

Mendeskripsikan upaya yang dilakukan Lembaga Adat Melayu Riau dalam menegakkan identitas kolektif masyarakat Riau.

Mendeskripsikan faktor-faktor yang menghambat dalam upaya menegakkan identitas kolektif masyarakat Riau.

2. Manfaat Penelitian

Kegunaan Akademis

Secara akademis hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang ilmu pemerintahan dan dapat digunakan sebagai acuan dalam melakukan penelitian secara lebih lanjut, terutama meneliti yang berkaitan dengan identitas kolektif masyarakat Riau.

Kegunaan Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan menambah pemahaman masyarakat dan instansi terkait yang mempunyai wewenang dan tanggungjawab mengenai pengembangan dan pelestarian identitas kolektif masyarakat Riau.

**4.Manfaat penelitian**

Manfaat dari penelitian adalah :

1. Memberikan sebuah informasi tentang kondisi budaya melayu (bahasa melayu) kepada masyarakat umumnya dan para akedemisi khususnya untuk menjadikan salah satu referensi guna penelitian yang berkaitan dengan budaya melayu di kota pekanbaru.
2. Memberikan sumbang dan saran kepada masyarakat serta pemerintah agar dunia pendidikan ini menjadi modal bagi masyarakat dalam menyambut era persaingan dan globalisasi agar mampu bersaing.

**Tinjauan Terdahulu**

Negara dan Masyarakat Sipil Study hubungan pemerintah daerah Riau dengan Lembaga Adat Melayu Riau (LAM Riau) yang dilakukan oleh Bakhri Efendi dan Penelitian Tri Ananda Putri (2014), penelitian ini menyimpulkan bahwa (1) Strategi pemerintah kota Pekanbaru dalam mengembangkan kebudayaan melayu sejauh ini hanya terfokus pada penampilan fisik tanpa memperhatikan unsur nilai yang terkandung didalamnya.

**Kerangka Teori**

Menurut Snelbecker, mendefenisikan teori sebagai seperangkat proposisi yang berinteraksi secara sintaksi (yaitu yang mengikuti aturan tertentu yang dapat dihubungkan secara logis dengan lainnya dengan data atas dasar yang dapat diamati) dan berfungsi sebagai wahana untuk meramalkan dan menjelaskan fenomena yang diamati.[[2]](#footnote-2)

Berdasarkan hal tersebut, maka berikut ini akan dikemukakan beberapa teori yang berhubungan dengan masalah penelitian ini, yaitu :

* 1. **Kelompok kepentingan *(Interest Group)***

Kelompok kepentinganadalah setiap organisasi yang berusaha mempengaruhi kebijaksanaan pemerintah, tanpa berkehendak memperoleh jabatan publik.

* 1. **Komunikasi**

Menurut Soewarno (2001), komunikasi adalah perpindahan informasi dari seseorang kepada orang lain melalui isyarat-isyarat, tanda-tanda atau simbol-simbol dengan bahasa yang dipahami dan dapat dimengerti.

* 1. **Proses Komunikasi**

Pada dasarnya proses komunikasi adalah proses penyampaian pemikiran atau gagasan seseorang kepada orang lain. Menurut widjaja (1999:22),

**Definisi Konseptual**

Lembaga Adat Melayu Riau adalah lembaga kemasyarkatan yang didirikan pada tahun 1970 di Kota Pekanbaru dengan tujuan mempertahankan nilai-nilai adat istiadat Melayu Riau dari terpaan budaya yang datang dari luar Riau.

Identitas yaitu Jatidiri yang identik pada suatau yang khas dan memiliki hal yang mengandung nilai-nilai luhur.

Kolektif yaitu sesuatu yang dilakukan secara bersama atau secara gabungan.

Masyarakat Riau ialah penduduk yang terdaftar sebagai orang yang berdomisili diprovinsi Riau dengan memiliki kartu tanda penduduk.

Identitas Kolektif Masyarakat Riau adalah Jatidiri yang secara bersama-sama dimiliki oleh masyarakat Riau dengan penuh kesadaran untuk mempertahankan dan melestraikan nilai-nilai budaya melayu Riau dalam konteks Tata Busana dan Bentuk Rumah Adat Melayu Riau.

Kebijakan adalah keputusan yang di buat oleh lembaga pemerintah yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat seperti, kebijakan mengatasi dan membela hak-hak masyarakat adat dan budaya masyarakat tempatan untuk terwujudnya visi Riau 2020.

Implementasi adalah suatu penerapan atau pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 36 Tahun 2001 dan Peraturan Daerah Provinsi Riau nomor 1 Tahun 2012 tentang Lembaga Adat Melayu Riau.

**Metode Penelitian**

**Pendekatan dan Teknis Penelitian**

Metode penelitian yang di gunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu suatu metode untuk meneliti status kelompok manusia, objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran, atau suatu kelas peristiwa pada masa sekarang[[3]](#footnote-3). Untuk keperluan analisis dalam penelitian ini, penulis membutuhkan gambaran atau deskripsi berupa data sekunder, seperti data yang tertulis dari buku-buku, media massa, dokumen dan peraturan perundang-undangan. Kemudian setelah data-data terkumpul dilakukan dengan menganalisa data dan fakta yaitu sebagai sebuah proses pemecahan suatu masalah yang diteliti dengan menerangkan keadaan sebuah objek penelitian berdasarkan fakta-fakta atau fenomena yang ada dilapangan.

**Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Kota Pekanbaru, dengan fokus penelitian pada Lembaga Adat Melayu Riau. Pemilihan lokasi dilakukan secara sengaja *(purposive)* atas dasar pertimbangan bahwa Lembaga Adat Melayu merupakan salah satu pilar pendukung terwujudnya visi Riau dan instansi lainnya yang terkait dengan topik penelitian yang mendukung ketersediaan data yang dibutuhkan dalam penelitian.

**Jenis Data**

1. Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari informan dan pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan program yang mendukung terwujudnya visi Riau 2025.

1. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari pihak kedua. Adapun data sekunder berupa data yang tertulis dari buku-buku, media massa, peraturan perundang-undangan dan laporan-laporan seperti Peraturan Daerah Provinsi Riau tahun 2012 tentang Lembaga Adat Melayu Riau.

**Sumber Data Penelitian**

1. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.[[4]](#footnote-4)

1. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data melalui pengamatan langsung secara cermat dan langsung di lapangan atau lokasi penelitian.Dalam hal ini, peneliti dengan berpedoman kepada desain penelitiannya perlu mengunjungi lokasi penelitian untuk mengamati langsung berbagai hal atau kondisi yang ada di lapangan.

1. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subyek penelitian, namun melalui dokumen. Dokumen yang digunakan dapat berupa laporan, media cetak, notulen rapat, peraturan dan undang-undang terkait dengan masalah yang diteliti.[[5]](#footnote-5)

1. Informan

Informan adalah orang yang menjadi narasumber dalam penelitian atau orang yang memberikan keterangan.Informan ialah suatu istilah orang yang memberikan data dalam bentuk informasi yang diketahui. Dalam penelitian ini,

**II**

**GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

**Profil Provinsi Riau**

**1. Sejarah Provinsi Riau**

Pembentukan Provinsi Riau ditetapkan dengan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957, yang kemudian diundangkan dalam Undang-undang Nomor 61 tahun 1958. Sama halnya dengan Provinsi lain yang ada di Indoensia, untuk berdirinya Provinsi Riau memakan waktu dan perjuangan yang cukup panjang, yaitu hampir 6 tahun (17 Nopember 1952 s/d 5 Maret 1958). Dalam Undang-undang pembentukan daerah swatantra tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau, Jo Lembaran Negara No 75 tahun 1957, daerah swatantra Tingkat I Riau meliputi wilayah daerah swatantra tingkat II, yaitu Bengkalis, Kampar, Indragiri, Kepulauan Riau dan Kotapraja Pekanbaru

Kota Pekanbaru ditetapkan sebagai ibukota Provinsi Riau pada tanggal 20 Januari 1959 melalui Surat Keputusan dengan No. Des.52/1/44-25, sementara realisasi pemindahan pemerintahan dari Tanjungpinang ke Pekanbaru dimulai pada awal Januari 1960 dan mulai saat itu resmilah Pekanbaru menjadi ibukota. Kemudian dilakukan penyempurnaan aparatur pemerintahan dan batas-batas wilayah kabupaten. Ditambah dengan adanya hasrat rakyat dari beberapa daerah seperti Indragiri Hilir, Rokan, Bagan Siapi-api dan lain-lain yang menginginkan supaya daerah-daerah tersebut dijadikan Kabupaten, maka oleh Pemerintah Daerah Provinsi Riau pada tanggal 15 Desember 1962 dengan SK. No.615 tahun 1962 di bentuklah suatu panitia yang menghasilkan pembagian 5 (lima) buah daerah tingkat II dan satu buah Kotamadya, yaitu Kotamadya Pekanbaru, Kabupaten Kampar, Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, Kepulauan Riau dan Bengkalis.

Seiring dengan berhembusnya “angin reformasi’ telah memberikan perubahan yang drastis terhadap negeri ini, tidak terkecuali di Provinsi Riau sendiri. Salah satu perwujudannya adalah dengan diberlakukannya pelaksanaan otonomi daerah yang mulai di laksanakan pada tanggal 1 Januari 2001. Hal ini berimplikasi terhadap timbulnya daerah-daerah baru di Indonesia, dari 27 Provinsi pada awalnya sekarang sudah menjadi 32 Provinsi. Tidak terkecuali Provinsi Riau, terhitung mulai tanggal 1 Juli 2004 Kepulauan Riau resmi mejadi Provinsi ke 32 di Indonesia, itu berarti Provinsi Riau yang dulunya terdiri dari 16 Kabupaten/Kota sekarang hanya menjadi 12 Kabupaten/Kota. Kabupaten-kabupaten tersebut adalah; (1) Kuantang Singingi, (2) Inderagiri Hulu, (3) Inderagiri Hilir, (4) Pelalawan, (5) Siak, (6) Kampar, (7) Rokan Hulu, (8) Bengkalis, (9) Rokan Hilir,(10) Rokan Hilir dan Kota (11) Pekanbaru, (12) Dumai.

**2. Kondisi Geografis**

Provinsi Riau secara geografis terletak pada jalur yang sangat strategis baik pada masa kini maupun pada masa yang akan datang karena terletak pada jalur perdagangan Regional dan Internasional di kawasan ASEAN melalui kerjasama IMT-GT dan IMS-GT. Setelah terjadi pemekaranan wilayah, Provinsi Riau yang dulunya terdiri dari 16 Kabupaten/Kota sekarang hanya tinggal 12 Kabupaten/Kota setelah Provinsi Kepulauan Riau terhitung 1 Juli 2004 resmi menjadi provinsi ke 32 di Indonesia.

**3. Jumlah Penduduk**

Pertumbuhan penduduk di suatu wilayah dapat diukur dari tingkat kepadatan penduduknya, semakin tinggi jumlah penduduk maka semakin tinggi pula tingkat kepadatan penduduknya dan begitu juga sebaliknya.Kepadatan penduduk dapat dipengaruhi oleh faktor geografi (fisiologis, sumberdaya alam, iklim dan topografi) dan faktor demografi (natalitas, mortalitas dan migrasi). Pada tahun 2015, jumlah penduduk Provinsi Riau adalah 5.877.887 jiwa dengan luas wilayah 89.150,16 Km2. Sehingga, rata-rata kepadatan penduduk Provinsi Riau per Juni 2015 adalah sebesar 65,93 orang/Km2.Jumlah Peduduk Provinsi Riau yang tersebar di 12 Kabupaten/Kota per Juni tahun 2015 mencapai 5.877.887jiwa yang terdiri dari 3.027.274jiwa penduduk laki-laki dan 2.850.613 jiwa penduduk perempuan.

**4. Jumlah Etnis**

Keberagaman masyarakat Provinsi Riau semakin terlihat dari persentase etnis yang terdiri dari Melayu, Jawa, Minang, Batak, Banjar, Bugis, tiongha dan suku-suku lainnya. Hal ini dapat dilhat pada tabel berikut ini :

**Tabel II.2**

**Etnis Yang Ada Provinsi Riau**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Suku** | **Jumlah** | **Persentase (%)** |
| 1 | Melayu | 2.103.659 | 37,74% |
| 2 | Jawa | 1.431.598 | 25,05% |
| 3 | Minang | 672.621 | 11,26% |
| 4 | Batak | 400.837 | 7,31% |
| 5 | Banjar | 191.787 | 3,78% |
| 6 | Bugis | 139.26 | 2,27% |
| 7 | Sunda | 103.012 | 1,6% |
| 8 | Tiongha | 188.897 | 3,72% |
| Jumlah | | 5.726.241 | 100 |

**5. Agama**

Selama tiga tahun terakhir, jumlah penduduk dikelompokan berdasarkan agama, terlihat bahwa penduduk Provinsi Riau pada tahun 2015 yang memeluk agama Islam berjumlah 5.105.892 jiwa atau 86.87% dari 5.877.887 jiwa penduduk di Provinsi Riau. Diikuti oleh pemeluk agama Kristen berjumlah 573.043 jiwa atau 9,74% dari total jumlah penduduk dan 2,28% pemeluk agama Buddha, 1,02% pemeluk agama Katolik, 0,01% pemeluk agama Hindu dan 0,07% pemeluk kepercayaan lainnya.

**6. Perekonomian**

Perkebunan yang berkembang adalah perkebunan [karet](https://id.wikipedia.org/wiki/Karet) dan perkebunan [kelapa sawit](https://id.wikipedia.org/wiki/Kelapa_sawit), baik itu yang dikelola oleh [negara](https://id.wikipedia.org/wiki/Negara) ataupun oleh [rakyat](https://id.wikipedia.org/wiki/Rakyat).Selain itu juga terdapat perkebunan [jeruk](https://id.wikipedia.org/wiki/Jeruk) dan [kelapa](https://id.wikipedia.org/wiki/Kelapa).Untuk luas lahan perkebunan kelapa sawit saat ini provinsi Riau telah memiliki lahan seluas 1.34 juta hektare.Selain itu telah terdapat sekitar 116 pabrik pengolahan kelapa sawit (PKS) yang beroperasi dengan produksi *coconut palm oil* (CPO) 3.386.800 ton per tahun.

**7. Perindustrian**

Pada provinsi ini terdapat beberapa perusahaan berskala internasional yang bergerak di bidang minyak bumi dan gas serta pengolahan hasil hutan dan sawit.Selain itu terdapat juga industri pengolahan [kopra](https://id.wikipedia.org/wiki/Kopra)dan [karet](https://id.wikipedia.org/wiki/Karet)*.*Beberapa perusahaan besar tersebut di antaranya[Chevron Pacific Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/Chevron_Pacific_Indonesia)anak perusahaan[Chevron Corporation](https://id.wikipedia.org/wiki/Chevron_Corporation)*,* PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk di Perawang, dan[PT. Riau Andalan Pulp & Paper](https://id.wikipedia.org/wiki/PT._Riau_Andalan_Pulp_and_Paper_%28RAPP%29) *di* [Pangkalan Kerinci](https://id.wikipedia.org/wiki/Pangkalan_Kerinci)*.*

**B. Lembaga Adat Melayu Riau**

**1. Sejarah Pendirian**

Melihat pentingnya menjaga adat istiadat dan nilai-nilai para leluhur di tanah Melayu Riau, oleh O.K Nizami Jamil bersama Djohan Syarifuddin mendatangi orang tua-tua, pemuka adat melayu Riau yang masih paham dan mengerti tentang adat istiadat Melayu Riau. Kemudian O.K Nizami Jamil bersama dengan Djohan Syarifuddin menemui datuk Wan Abdul Rachman selaku Wakil Gubernur Riau, pemuka adat kerajaan siak yang pernah menjabat Datuk Bandar di Propinsi Pekanbaru tahun 1939 pada masa kerajaan Siak, Pemerintahan Sultan Syarif Kasim II. Akhirnya pada tanggal 06 Juni 1970 pemuka adat dan masyarakat yang ditemui diundang oleh Datuk Wan Abdul Rachman untuk mengadakan pertemuan dikantor Gubernur Riau, Pertemuan tersebut dipimpin langsung oleh Datuk Wan Abdul Rachman yang merupakan perpanjangan tangan Gubernur Riau. Dalam pertemuan itu Datuk Wan Abdul Rachman menyampaikan pesan dan maksud Bapak Gubernur Riau bahwa perlu adanya perkumpulan Pemuka Adat Melayu Daerah Riau yang berbentuk sebuah lembaga Adat Melayu Riau untuk menggalang persatuan, kesatuan, pendapat dan fikiran guna menggali serta membangkitkan batang terendam Adat Melayu Riau yang diwariskan oleh pendahulu Masyarakat Riau yang pernah berjasa dan berjaya memimpin negeri Melayu. Setelah mendengar penyampaian dan saran oleh Datuk Wan Abdul Rachman, dengan suara bulat para pemuka masyarakat yang diwakili oleh pemuka-pemuka adat dari kesatuan adat bekas kerajaan Melayu di Riau bersepakat dan setuju dengan dibentuknya sebuah Lembaga Adat Melayu Riau yang diberinama “Lembaga Adat Daerah Riau”.[[6]](#footnote-6)

**Struktur Lembaga Adat Melayu Periode 2012-2017**

**Dewan Kehormatan Adat LAM Riau**

**Majelis Kerapatan Adat LAM Riau**

**Dewan Pengurus Harian LAM Riau**

**III**

**PEMBAHASAN**

**Lembaga Adat Melayu Riau Dalam Menegakkan Identitas Kolektif Masyarakat Riau**

Keberadaan budaya melayu semakin hari sangat meprihatinkan, di mana beberapa identitas budaya melayu mulai redup ditengah-tengah kehidupan masyarakat.Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau sebuah organisasi mempunya tanggung jawab besar untuk menjaga, menegakkan identitas dan melestarikan kebudayaan melayu itu sendiri.

Pembinaan dan pengemban­gan upaya yang dilakukan Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau bersama pemerintah daerah me­lalui dalam rangka pembangunan kebudayaan mela­yu adalah pelestarian. Sebagaimana dijelas­kan bahwa yang dimaksud dengan pelestarian adalah upaya menjaga dan memeliharan adat istiadat dan nilai so­sial budaya masyarakat, terutama nilai-nilai akhlak, moral dan adab yang merupakan inti dari adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat agar keberadaannya tetap terjaga dan berlanjut.

Adapun diantara identitas kolektif masyarakat Melayu Riau yang harus di pertahankan dan ditegakkan dalam masyarakat diantaranya sebagai berikut :

Simbol-simbol dalam pakaian orang melayu dapat menunjukkan identitas orang melayu itu sendiri, mencerminkan status seseorang seperti raja, hulubalang, rakyat biasa, mencerminkan jati diri dan kepribadian orang melayu, Sebagai simbol atau lambang keluhuruan seluruh masyarakat yang menunjukkan nilai-nilai sebagai manusia yang berperadaban. Dipengaruhi oleh nilai-nilai luhur agama islam, merupakan salah satu keagungan budaya melayu dan merupakan puncak kebudayaan melayu yang dapat kita saksikan sekarang ini.

1. **Tata Busana Melayu**

Bagi orang melayu, pakaian selain berfungsi sebagai penutup aurat dan pelindung tubuh dari panas dan dingin, juga mengisyaratkan lambang-lambang.Lambang-lambang itu mewujudkan nilai-nilai luhur yang dijunjung tinggi oleh masyarakatnya.

Upaya yang di lakukan oleh Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau dalam menegakkan identitas dan melestarikan kebudayaan melayu di masyarakat melayau Riau di antaranya :[[7]](#footnote-7)

* + 1. Pelestarian budaya melayu yang dilakukan dengan cara berinteraksi langsung dengan masyarakat untuk memperkenalkan kebudayaan dengan tujuan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat akan betapa pentingnya kebudayaan dalam kehidupan masyarakat. Misalnya mengeluarkan kebijakan, memberikan sosialisasi, rapat kecil ataupun seminar-seminar kecil tentang kebudayaan melayau Riau;

1. LAM Riau menjalin hubungan kerjasama dengan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau.
   * + LAM Riau mekankan penanaman tata busana melayu dalam menyambut tamu dari luar Riau pada setiap event-event yang dilaksanakan diprovinsi Riau
     + LAM Riau menjadi narasumber penyampaian materi mengenai kebudayaan Melayu Riau pada pelatihan Akomodasi Pekan Olahraga Nasional (PON) XVIII Tahun 2012 yang dilaksanakan di 10 kabupaten/kota di Provinsi Riau. Dilaksanakan pada tanggal 09 s.d 17 Juli 2012.
     + LAM Riau melakukan pembinaan dan pendidikan kepada kelompok Pemuda/Mahasiswa tentang tatabusana dan tatakerama Melayu.

b. LAM Riau Menjalin Hubungan dengan Dinas Pendidikan Provinsi Riau

- Penandatanganan Iktiraf kesepahaman (Memorendum of Understanding)/MoU antara LAMR dan Dinas Pendidikan Provinsi Riau.

- Terbentuknya Perda nomor 12 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan Pendidikan. Menetapkan mata pelajaran budaya melayu menjadi muatan lokal yang didalamnya akan diajarkan tentang identitas kolektif masyarakat Riau termasuk tentang tata busana Melayu Riau.

- Menghadiri Rapat Tim Penilai Buku Muatan Lokal Budaya Melayu Riau.

- LAM Riau Merekomendasikan nama-nama yang berkompeten untuk mengajarkan muatan lokal budaya melayu.

c. Membangun Kerjasama denga Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Riau.

- Dinas Kebudayaan dan Pariwisata berhasil membuat kesepahaman bersama untuk memajukan dan menggemakan kebudayaan Melayu di Provinsi Riau dan merencanakan pelaksanaan festival budaya Melayu di Tahun 2013.

- Dinas Kebudayaan dan Pariwisata melibatkan LAM Riau dalam koordinasi bidang kebudayaan dan pariwisata Provinsi Riau Tahun 2013.

- Dinas Kebudayaan dan Pariwisata melibatkan LAM Riau dalam rapat koordinasi pembangunan kemitraan pariwisata Riau 2013.

- Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Riau membuat Program pengembangan pariwisata berbasis budaya dengan tagline Riau The Homeland of Melayu

* + 1. Pelestarian budaya yang dilakukan dengan cara terjun langsung kedalam sebuah pengalaman kultural. contohnya, jika kebudayaan tersebut berbentuk tarian, maka masyarakat dianjurkan untuk belajar dan berlatih dalam menguasai tarian tersebut dan  melakukan regenarasi. Dengan demikian dalam setiap tahunnya selalu dapat dijaga kelestarian budaya ini. Diantaranya ;

a. LAM Riau bekerjasama dengan Dinas Kebudayan dan Pariwisata Provinsi Riau

* + - LAM Riau terlibat dikegiatan Dinas Kebudayaan dan pariwisata dalam rangka parade Tari Daerah Riau.
    - Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif melibatkan Dewan Krajinan Nasional Daerah untuk membuat tenun dan pakaian Melayu.[[8]](#footnote-8)
    - LAM Riau memberi pelatihan Tari persembahan untuk siswa dan guru-guru sekolah serta untuk sanggat tari.
    1. Pelestarian budaya yang dilakukan dengan cara membuat suatu pusat informasi mengenai kebudayaan yang dapat difungsionalisasi kedalam berbagai bentuk. Tujuannya adalah untuk edukasi ataupun untuk kepentingan pengembangan kebudayaan itu sendiri dan potensi kepariwisataan daerah sehingga menghasilkan income bagi daerah. Diantaranya ;

a. LAM Riau menjalin kerjasama dengan media cetak.

- Beberapa media cetak menampilkan tunjuk ajar melayu yang disampaikan oleh alm. Datuk Tenas Effendy.

b. LAM Riau berkerja sama dengan perancang Website

- Membuat laman LAMRiau.id

**Bangunan Tradisional Melayu**

Bagunan taradisional melayu merupakan salah salah satu identitas kebudayaan melayu yang harus di jaga dan dilestarikan.Dimana fungsi dan bentuk bangunan tradisional sebagai ciri khasnya, disamping nilai-nilai Universal yang dikandungnya.Demikian pula halnya dengan orang Melayu.Bahwa wilayah melayu yang besar itu mempunyai persamaan dan perbedaan jika diperhatikan lebih mendetail.

Mengenai bentuk bangunan tradisional Melayu biasanya ditentukan oleh bentuk atapnya sebagai berikut :[[9]](#footnote-9)

Rumah yang perabungnya lurus dipertengahan pucuk atap, dengan kedua bagian sisi atapnya curam ke bawah seperti huruf V terbalik disebut atap belah bubung, bubung Melayu atau rabung Melayu.

Jika atapnya curam sekali disebut lipat pandan

Jika atapnya mendatar disebut lipat kajang

Jika bagian bawah atap umpamanya diberi tambahan atap lain, disebut atap labu, atap layar, atap bersayap atau atap beringgam

Jika perabung atap bangunan itu sejajar dengan jalan raya, disebut dengan rumah perabung panjang.

Sebaliknya jika terletak tidak sejajar disebut pula rumah perabung melintang.

Jika perabung bangunan itu melentik ke atas pada kedua ujungnya maka disebut dengan rumah lontik, rumah pencelang, rumah lancang.

Jika atap rumah lontik bertingkat maka disebut dengan rumah goral atau gerai.

Rumah atap limas yang diberi tambahan di bagian muka dan belakang dengan atap lain yang berbentuk limas pula disebut limas penuh.

Tapi jika atap tambahan itu berbentuk belah burung rumah itu disebut limas berabung melayu.

Pada akhirnya simbol-simbol dalam dunia Melayu dan begitu juga dengan lambang-lambang dalam seni bangunan tradisional budaya Melayu dapat menunjukkan identitas orang Melayu itu sendiri, mencerminkan status seseorang seperti raja, hulubalang, rakyat biasa dan lain-lain, dimana dapat mencerminkan jati diri dan kepribadian orang melayu, sebagai simbol atau lambang keluhuran seluruh masyarakat yang menunjukkan nilai-nilai sebagai manusia yang berperadaban dan dipengaruhi oleh nilai-nilai luhur agama Islam, merupakan salah satu keunggulan budaya Melayu dan merupakan puncak kebudayaan Melayu yang dapat kita saksikan sekarang ini.

1. Pelestarian budaya melayu yang dilakukan dengan cara berinteraksi langsung dengan masyarakat untuk memperkenalkan kebudayaan dengan tujuan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat akan betapa pentingnya kebudayaan dalam kehidupan masyarakat. Misalnya memberikan sosialisasi, rapat kecil ataupun seminar-seminar kecil tentang kebudayaan melayau Riau.

a. LAM Riau menjalin hubungan kerjasama dengan Dinas PU Provinsi Riau

- Melakukan pertemuan dengan Dinas PU Provinsi Riau mengenai seni bina Melayu Riau.

- Mendorong terbitnya Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 26 Tahun 2013 tentang Pelestarian Cagar Budaya yang kemudian Berhasil ditetapkan.

- LAM Riau menindaklanjuti kesepakatan tentang bangunan gapura di jalan karet pasar bawah Pekanbaru.

1. Pelestarian budaya yang dilakukan dengan cara terjun langsung kedalam sebuah pengalaman kultural. contohnya, jika kebudayaan tersebut berbentuk proses pembangunan, maka masyarakat dianjurkan untuk belajar dan berlatih dalam menguasai proses pembuatan bangunan tersebut dan  melakukan regenarasi. Dengan demikian dalam setiap tahunnya selalu dapat dijaga kelestarian budaya ini.

a. LAM Riau bersama Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Riau

- Melakukan pembinaan Seni Bangunan Melayu kepada Asosiasi Arsitektur Indonesia untuk menghasilkan bangunan ataupun interior yang bernuansa Melayu.

1. Pelestarian budaya yang dilakukan dengan cara membuat suatu pusat informasi mengenai kebudayaan yang dapat difungsionalisasi kedalam berbagai bentuk. Tujuannya adalah untuk edukasi ataupun untuk kepentingan pengembangan kebudayaan itu sendiri dan potensi kepariwisataan daerah sehingga menghasilkan income bagi daerah

a. LAM Riau bersama Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Riau

- Merancang galeri online yang memuat bangunan tradisional Melayu Riau dari setiap kabupaten/Kota sehingga menarik para wisatawan untuk berkunjung dan melihat lokasi tersebut secara langsung.

**Faktor-Faktor Yang Menghambat Upaya Menegakkan Identitas Kolektif Masyarakat Riau**

Dukungan pemerintah terhadap Lembaga Adat Melayu Riau yaitu berupa dana hibah yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Riau terhadap Lembaga Adat Melayu Riau. Dari dana itulah kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh Lembaga Adat Melayu Riau. Karena LAM Riau memenuhi kriteria untuk diberikan dana hibah oleh pemerintah Provinsi Riau, adapun kriterianya antara lain: untuk peningkatan fungsi pemerintahan, layanan dasar umum, dan pemberdayaan masyarakat.

Selain dari dana hibah bentuk bantuan pemerintah daerah Provinsi Riau terhadap LAM Riau adalah berupa kerjasama dengan instansi-instansi terkait, seperti: Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah (Dinaskimpraswil) untuk menata dan menyusun bentuk bangunan perkantoran dan gedung-gedung pemerintah yang menggunakan arsitektur melayu lengkap dengan sejarah dan filosofinya, Dinas Pendidikan yang bekerja sama untuk mensosialisakikan kurikulum kebudayaan Melayu Riau agar dapat dimasukkan dalam materi pelajaran moatanlokal, Dinas Pariwisata yang bekerjasama dalam pengembangan Budaya Melayu.Kemudian LAM Riau juga melibatkan Pihak Swasta untuk mendukung tegaknya Identitas Kolektif Melayu didalam aktifitas diperkantoran swasta.Seperti di BANK, Hotel dan Perusahaan sudah ada yang menampilkan symbol secara ikonik identitas melayu, namun hal tersebut belum maksimal sebab harus menyesuaikan dengan ketetapan masing-masing perusahaan yang terpusat.

Rudi Fajar selaku Direktur Utama RAPP ketika diwawancara mengatakan Dari beberapa Tahun yang Lalu RAPP telah membuat kegiatan yang turut mendukung pelestarian budaya Melayu, seperti Festival Budaya yang rutin kita laksanakan.Kalau dalam konteks tata busana, sekitar delapan Tahun yang lalu kita telah membuat seragam baju melayu untuk seluruh karyawan namun hal itu terhenti dan sekarang lebih difokuskan penggunaan tatabusana melayu ditempat penyambutan tamu dari luar, sebagai contoh di hotel unigraha RAPP.[[10]](#footnote-10)

Faktor yang menghambat upaya menegakkan identitas kolektif masyarakat Riau:

**Kesadaran Masyarakat**

a. Masih rendahnya kesadaran masyarakat Riau dalam mengembangkan dan melestarikan adat dan budaya Melayu. Kondisi ini menyebabkan adat dan budaya Melayu belum sepenuhnya menjadi ‘tuan’ di negerinya sendiri.Sementara itu LAM Riau terus berupaya menanamkan dan memperluas pengetahuan masyarakat serta memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa pentingnya menjaga dan mengembangkan budaya Melayu dan meneggakkan identitas kolektif.[[11]](#footnote-11)

b. Adanya anggapan bahwa menggali, membina melestarikan memelihara dan mengembangkan nilai-nilai adat dan nilai-nilai social budaya adalah sesuatu yang ketinggalan zaman.

c. Kurangnya kesadaran dan sinergi dari lembaga-lembaga, ormas atau organisasi pemuda yang ada diprovinsi Riau untuk menjaga dan melestarikan budaya melayu.

d. Tidak adanya kesadaran dari orang tua untuk menanamkan nilai budaya Melayu Riau sebagai budaya lokal kepada anaka-anak melalui interaksi dirumah yang sebetulnya bisa menjadi pondasi awal pengenalan budaya melayu sejak dini.

e. Banyaknya tokoh-tokoh melayu yang berselisih paham dan tidak satu pandangan dalam bingkai semangat kemelayuan di Provinsi Riau.

f. Adanya pihak-pihak yang sengaja menginginkan Provinsi Riau tidak kuat dalam konteks Sumber Daya Manusia Lokal dan Kebudayaan terkhusus penguatan budaya Melayu.

**Kemajemukan Budaya**

a. Kemajemukan budaya yang ada di Riau seperti minang, bugis, tionghoa, Jawa dan batak dan lainnya dapat menepikan Budaya Melayu itu sendiri jika budaya Melayu tidak Eksis.

b. Karena berasal dari latarbelakang budaya yang beragam, Bahasa Melayu sangat susah untuk diterapakan dalam pergaulan sehari-hari jika orang melayu sendiri masih malu menggunakan bahasa melayu dalam pergaulannya.[[12]](#footnote-12)

c. Dengan banyaknya masyarakat yang berlatarbelakang budaya berbeda membuat masyarakat melayu yang cenderung permisif dan tidak menyukai konflik meninggalkan kota yang merupakan menjadi cerminan identitas provinsi Riau.

d. Paguyuban masyarakat etnis non melayu terkadang juga kurang menampilkan dan memberikan penekanan pada kelompoknya untuk menjaga sepenuhnya identias Kemelayuan agar tetap eksis diprovinsi Riau.

Kondisi Politik dan Pemerintahan

a. Kurangnya perhatian dari pemerintah terhadap kebudayaan melayu itu sendiri. Pemerintah dipandang masih belum begitu serius dan maksimal untuk melestarikan budaya yang kita miliki, bahkan negara lainlah yang memperkenalkan budaya Indonesia ke kancah internasional.

b. Pejabat Instansi/Dinas di Provinsi Riau masih banyak yang belum serius untuk bersinergi dalam program-programnya untuk dapat mendukung tegaknya identitas kolektif masyarkat Riau, hal ini terbukti karena hanya beberapa Dinas yang bersilaturrahmi dan berkordinasi dengan LAM Riau.

c. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau kurang Komunikatif dan Kordinasi dengan LAM Riau terkait rencana-rencana yang harusnya bisa menampilkan wajah Provinsi Riau yang penuh dengan semangat kemelayuan.

d. Bergantinya pemimpin atau pemegang kebijakan politik selalu menghambat program karena selalu membawa prioritas yang berbeda.

e. Pemerintah dipanddang sangat kurang melibatkan pemuda dalam bentuk kaderisasi budaya Melayu. Sebenarnya pemuda dalam pergaulannya mempunyai peluang besar dalam membentuk interaksi sosial yang bisa mencerminkan identitas daerah seperti yang telah dicita-citakan.[[13]](#footnote-13)

**DAFTAR PUSTAKA**

Ok Nizami Jamil. 2011. *Sejarah Lembaga Adat Melayu Riau.* Pekanbaru :Lembaga Warisan Budaya Melayu Riau

Lexy J. Moleong. 2005. *Metodologipenelitiankualitatif.*Bandung :PT RemajaRosdakarya.

Sujianto. 2008. *ImplementasiKebijakanPublik*:*Konsep, Teori dan Praktik*. Pekanbaru :Alaf Riau.

Subarsono. 2005*. Analisiskebijakanpublik (konsep, teori, dan aplikasi.* Yogyakarta :PustakaPelajar.

William Dunn. 2003. *PengantarAnalisisKebijakanPublik*. Yogyakarta: GadjahMada University Press.

Budi Winarno. 2002. Teori dan Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta : Media Presindo

Suharto. 2005. Kebijakan-Kebijakan Organisasi. Jakarta : Bumi Aksara

RiantNugroho. 2003. *KebijakanPublikFormulasi, Implementasi dan Evaluasi.* Jakarta : PT Elex Media Komputindo.

Miriam Budiardjo. 2008. *Dasar-dasarIlmuPolitik.* Jakarta:PT.GramediaPustakaUtama.

MiftahThoha. 1984. *Dimensi-dimensi Prima ilmuAdministrasiNegara* .Jakarta:Rajawali.

HeselnogiTangkilisan.2003. *KebijakanPublikUntukPemimpinberwawasanInternasional.*Yogyakarta:Balairungdan Co.

RamlanSurbakti. 2010. *MemahamiIlmuPolitik*. Jakarta:Grasindo.

Burhanbungin. 2001.*Metodepenelitiansosial*. Surabaya :Airlangga university press.

Iqbal Hasan. 2002.*MetodologiPenelitian dan aplikasinya.*Jakarta :Ghalia Indonesia.

**DasarHukum :**

Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 36 Tahun 2001 tentang Visi Riau 2020

Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 1 tahun 2012 tentang Lembaga Adat Melayu Riau.

Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

**Media Online :**

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi Riau.<http://jdih.riau.go.id/web/statis/visi-&-misi/1>. **Visi Pembangunan Provinsi Riau (Perda Provinsi Riau Nomor 36 Tahun 2001).**Diakses tanggal 25 Desember 2015 Pukul 15.00.

**SKRIPSI**

Bakhri Effendi, Negara dan Masyarakat Sipil Studi hubungan pemerintah daerah Riau dengan Lembaga Adat Melayu Riau. Universitas Riau. 2013.

Triananda putri, Terwujudnya Kota Pekanbaru Sebagai Pusat Perdagangan Dan Jasa, Pendidikan serta Pusat Kebudayaan Melayu, Menuju Masyarakat Sejahtera yang Berlandaskan Iman dan Taqwa. Universitas Riau. 2013.

1. Perda Provinsi Riau No 01 Tahun 2012 Tentang Lembaga Adat Melayu Riau [↑](#footnote-ref-1)
2. Lexy J. Moleong. *Metodologi penelitian kualitatif.* (Bandung :PT Remaja Rosdakarya,2005) hal.57 [↑](#footnote-ref-2)
3. Sujianto. *Implementasi Kebijakan Publik* :*Konsep, Teori dan Praktik*. (Pekanbaru : Alaf Riau, 2008), hal. 34 [↑](#footnote-ref-3)
4. Lexy J. Moleong.*Metodologi penelitian kualitatif.* (Bandung :PT Remaja Rosdakarya, 2005) hal 186. [↑](#footnote-ref-4)
5. Iqbal Hasan. *Metodologi Penelitian dan aplikasinya.* (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2002), hal. 87 [↑](#footnote-ref-5)
6. Ok Nizami Jamil. *Sejarah Lembaga Adat Melayu Riau, (*Pekanbaru,Lembaga Warisan Budaya Melayu Riau,2011), hal. 7 [↑](#footnote-ref-6)
7. Al Azhar, Ketua DPH Riau, *wawancara,* 22 Januari 2017 [↑](#footnote-ref-7)
8. Fahmizal, Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi kreatif, *Wawancara*, 10 Mei 2017 [↑](#footnote-ref-8)
9. M. Hasril Kamil, Pengurus LAM Kampar, *wawancara,* 2 Februari 2017 [↑](#footnote-ref-9)
10. Rudi Fajar, Direktur Utama Riau Andalan Pulp and Paper, *wawancara,* 25 Mei 2017. [↑](#footnote-ref-10)
11. Azali Johan, Tokah Masyarakat, *wawancara*, 1 Februari 2017 [↑](#footnote-ref-11)
12. Efendi, Ketua Laskar Melayu Riau, *Wawancara* 01 April 2017. [↑](#footnote-ref-12)
13. Satrio Rachmazan, Ketua Ikatan Mahasiswa INHU Pekanbaru, Wawancara, 02 April 2017 [↑](#footnote-ref-13)